



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan *Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2014*, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Klasifikasi Dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri D Nomor 2), sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan perdalaman serta lautan wilayah Kabupaten.
5. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan dan/atau laut.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
7. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli, Nilai Jual Objek pajak ditentukan melalui pertandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak Penggantian.
8. Klasifikasi adalah pengelompokan nilai jual Bumi atau nilai jual Bangunan yang digunakan sebagai pedoman penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Jual Objek Pajak Bangunan.
9. Nilai Indikasi Rata-rata adalah Nilai Pasar rata-rata yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu Zona Nilai Tanah.
10. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang mempunyai suatu Nilai Indikasi Rata-Rata yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satu wilayah administrasi desa/kelurahan.
11. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disingkat dengan DBKB, adalah daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama dan/atau biaya komponen material bangunan dan/atau biaya komponen fasilitas bangunan.

BAB II

KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK

Pasal 2

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP.

Pasal 3

- (1) NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan berdasarkan klasifikasi NJOP Bumi dan Bangunan
- (2) Klasifikasi NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal nilai jual Bumi lebih besar dari nilai jual tertinggi Klasifikasi NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka nilai jual Bumi tersebut ditetapkan sebagaimana NJOP Bumi.
- (4) Klasifikasi NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam hal nilai jual Bangunan lebih besar dari nilai jual tertinggi Klasifikasi NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka nilai jual Bangunan tersebut ditetapkan sebagaimana NJOP Bangunan.

BAB III

PENETAPAN NJOP SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK

Pasal 4

- (1) Penetapan NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat dilakukan dengan perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, nilai perolehan baru, atau nilai jual penggantian.
- (2) Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
- (3) Nilai perolehan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.
- (4) Nilai jual penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

Pasal 5

- (1) Objek Pajak yang tidak bersifat khusus, Nilai Jual Objek Pajaknya ditentukan berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang diperoleh dari hasil penilaian secara massal
- (2) Objek Pajak tertentu yang bersifat khusus, Nilai Jual Objek Pajaknya dapat ditentukan berdasarkan nilai pasar yang dilakukan oleh petugas penilai secara individual.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan NJOP sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara berkala.
- (2) Penetapan NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) NJOP Bumi dan Bangunan yang digunakan untuk menetapkan pajak pada awal tahun pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjadi Pajak Daerah merupakan data NJOP berdasarkan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat.
- (4) Format Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat NJOP Bumi dan DBKB.
- (2) NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Nilai Indikasi Rata-Rata dalam suatu ZNT.
- (3) DBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perhitungan nilai bangunan.
- (4) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penetapan NJOP Bangunan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 27 Januari 2014

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 27 Januari 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ABDUL ZAMAN

Lampiran I : PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 4 TAHUN 2014
TANGGAL : 27 JANUARI 2014

KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI

Klas	Pengelompokan Nilai Jual Bumi (Rp / m ²)	Nilai Jual Objek Pajak (Rp / m ²)
1	2	3
001	> 67.390.000,00 s.d 67.700.000,00	68,545,000.00
002	> 65.120.000,00 s.d 67.390.000,00	66,255,000.00
003	> 62.890.000,00 s.d 65.120.000,00	64,000,000.00
004	> 60.700.000,00 s.d 62.890.000,00	61,795,000.00
005	> 58.550.000,00 s.d 60.700.000,00	59,625,000.00
006	> 56.440.000,00 s.d 58.550.000,00	57,495,000.00
007	> 54.370.000,00 s.d 56.440.000,00	55,405,000.00
008	> 52.340.000,00 s.d 54.370.000,00	53,355,000.00
009	> 50.350.000,00 s.d 52.340.000,00	51,345,000.00
010	> 48.400.000,00 s.d 50.350.000,00	49,375,000.00
011	> 46.490.000,00 s.d 48.400.000,00	47,445,000.00
012	> 44.620.000,00 s.d 46.490.000,00	45,555,000.00
013	> 42.790.000,00 s.d 44.620.000,00	43,705,000.00
014	> 41.000.000,00 s.d 42.790.000,00	41,895,000.00
015	> 39.250.000,00 s.d 41.000.000,00	40,125,000.00
016	> 37.540.000,00 s.d 39.250.000,00	38,395,000.00
017	> 35.870.000,00 s.d 37.540.000,00	36,705,000.00
018	> 34.240.000,00 s.d 35.870.000,00	35,055,000.00
019	> 32.650.000,00 s.d 34.240.000,00	33,445,000.00
020	> 31.100.000,00 s.d 32.650.000,00	31,875,000.00
021	> 29.590.000,00 s.d 31.100.000,00	30,345,000.00
022	> 28.120.000,00 s.d 29.590.000,00	28,855,000.00
023	> 26.690.000,00 s.d 28.120.000,00	27,405,000.00
024	> 25.300.000,00 s.d 26.690.000,00	25,995,000.00
025	> 23.950.000,00 s.d 25.300.000,00	24,625,000.00
026	> 22.640.000,00 s.d 23.950.000,00	23,295,000.00
027	> 21.370.000,00 s.d 22.640.000,00	22,005,000.00
028	> 20.140.000,00 s.d 21.370.000,00	20,755,000.00
029	> 18.950.000,00 s.d 20.140.000,00	19,545,000.00
030	> 17.800.000,00 s.d 18.950.000,00	18,375,000.00
031	> 16.690.000,00 s.d 17.800.000,00	17,245,000.00
032	> 15.620.000,00 s.d 16.690.000,00	16,155,000.00
033	> 14.590.000,00 s.d 15.620.000,00	15,105,000.00
034	> 13.600.000,00 s.d 14.590.000,00	14,095,000.00
035	> 12.650.000,00 s.d 13.600.000,00	13,125,000.00
036	> 11.740.000,00 s.d 12.650.000,00	12,195,000.00
037	> 10.870.000,00 s.d 11.740.000,00	11,304,000.00
038	> 10.040.000,00 s.d 10.870.000,00	10,455,000.00
039	> 9.250.000,00 s.d 10.040.000,00	9,645,000.00
040	> 8.500.000,00 s.d 9.250.000,00	8,875,000.00
041	> 7.790.000,00 s.d 8.500.000,00	8,145,000.00
042	> 7.120.000,00 s.d 7.790.000,00	7,455,000.00
043	> 6.490.000,00 s.d 7.120.000,00	6,805,000.00
044	> 5.900.000,00 s.d 6.490.000,00	6,195,000.00
045	> 4.840.000,00 s.d 5.900.000,00	5,625,000.00
046	> 4.840.000,00 s.d 5.350.000,00	5,095,000.00
047	> 4.370.000,00 s.d 4.840.000,00	4,605,000.00
048	> 3.940.000,00 s.d 4.370.000,00	4,155,000.00
049	> 3.550.000,00 s.d 3.940.000,00	3,745,000.00

Klas	Pengelompokan Nilai Jual Bumi (Rp / m ²)	Nilai Jual Objek Pajak (Rp / m ²)
1	2	3
050	> 3.200.000,00 s.d 3.550.000,00	3,375,000.00
051	> 3.000.000,00 s.d 3.200.000,00	3,100,000.00
052	> 2.850.000,00 s.d 3.000,000,00	2,925,000.00
053	> 2.708.000,00 s.d 2.850.000,00	2,779,000.00
054	> 2.573.000,00 s.d 2.708.000,00	2,640,000.00
055	> 2.444.000,00 s.d 2.573.000,00	2,508,000.00
056	> 2.261.000,00 s.d 2.444.000,00	2,352,000.00
057	> 2.091.000,00 s.d 2.261.000,00	2,176,000.00
058	> 1.934.000,00 s.d 2.091.000,00	2,013,000.00
059	> 1.789.000,00 s.d 1.934.000,00	1,862,000.00
060	> 1.655.000,00 s.d 1.789.000,00	1,722,000.00
061	> 1.490.000,00 s.d 1.655.000,00	1,573,000.00
062	> 1.341.000,00 s.d 1.490.000,00	1,416,000.00
063	> 1.207.000,00 s.d 1.341.000,00	1,274,000.00
064	> 1.086.000,00 s.d 1.207.000,00	1,147,000.00
065	> 977.000,00 s.d 1.086.000,00	1,032,000.00
066	> 855.000,00 s.d 977.000,00	916,000.00
067	> 748.000,00 s.d 855.000,00	802,000.00
068	> 655.000,00 s.d 748.000,00	702,000.00
069	> 573.000,00 s.d 655.000,00	614,000.00
070	> 501.000,00 s.d 573.000,00	537,000.00
071	> 426.000,00 s.d 501.000,00	464,000.00
072	> 362.000,00 s.d 426.000,00	394,000.00
073	> 308.000,00 s.d 362.000,00	335,000.00
074	> 262.000,00 s.d 308.000,00	285,000.00
075	> 223.000,00 s.d 262.000,00	245,000.00
076	> 173.000,00 s.d 223.000,00	200,000.00
077	> 142.000,00 s.d 178.000,00	160,000.00
078	> 114.000,00 s.d 142.000,00	128,000.00
079	> 91.000,00 s.d 114.000,00	103,000.00
080	> 73.000,00 s.d 91.000,00	82,000.00
081	> 55.000,00 s.d 73.000,00	64,000.00
082	> 41.000,00 s.d 55.000,00	48,000.00
083	> 31.000,00 s.d 41.000,00	36,000.00
084	> 23.000,00 s.d 31.000,00	27,000.00
085	> 17.000,00 s.d 23.000,00	20,000.00
086	> 12.000,00 s.d 17.000,00	14,000.00
087	> 8.400,00 s.d 12.000,00	10,000.00
088	> 5.900,00 s.d 8.400,00	7,150.00
089	> 4.100,00 s.d 5.900,00	5,000.00
090	> 2.900,00 s.d 4.100,00	3,500.00
091	> 2.000,00 s.d 2.900,00	2,450.00
092	> 1.400,00 s.d 2.000,00	1,700.00
093	> 1.050,00 s.d 1.400,00	1,200.00
094	> 760,00 s.d 1.050,00	910.00
095	> 550,00 s.d 760,00	660.00
096	> 410,00 s.d 550,00	480.00
097	> 310,00 s.d 410,00	350.00
098	> 240,00 s.d 310,00	270.00
099	> 170,00 s.d 240,00	200.00
100	≤ 170,00	140.00

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

H. YUSRAN ASPAR

**Lampiran II : PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 4 TAHUN 2014
TANGGAL : 27 JANUARI 2014**

KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BANGUNAN

Klas	Pengelompokan Nilai Jual Bumi (Rp / m²)	Nilai Jual Objek Pajak (Rp / m²)
1	2	3
001	> 14.700.000,00 s.d 15.800.000,00	15,250,000.00
002	> 13.600.000,00 s.d 14.700.000,00	14,150,000.00
003	> 12.550.000,00 s.d 13.600.000,00	13,075,000.00
004	> 11.550.000,00 s.d 12.550.000,00	12,050,000.00
005	> 10.600.000,00 s.d 11.550.000,00	11,075,000.00
006	> 9.700.000,00 s.d 10.600.000,00	10,150,000.00
007	> 8.850.000,00 s.d 9.700.000,00	9,275,000.00
008	> 8.050.000,00 s.d 8.850.000,00	8,450,000.00
009	> 7.300.000,00 s.d 8.050.000,00	7,675,000.00
010	> 6.600.000,00 s.d 7.300.000,00	6,950,000.00
011	> 5.850.000,00 s.d 6.600.000,00	6,225,000.00
012	> 5.150.000,00 s.d 5.850.000,00	5,500,000.00
013	> 4.500.000,00 s.d 5.150.000,00	4,825,000.00
014	> 3.900.000,00 s.d 4.500.000,00	4,200,000.00
015	> 3.350.000,00 s.d 3.900.000,00	3,625,000.00
016	> 2.850.000,00 s.d 3.350.000,00	3,100,000.00
017	> 2.400.000,00 s.d 2.850.000,00	2,625,000.00
018	> 2.000.000,00 s.d 2.400.000,00	2,200,000.00
019	> 1.666.000,00 s.d 2.000.000,00	1,833,000.00
020	> 1.366.000,00 s.d 1.666.000,00	1,516,000.00
021	> 1.034.000,00 s.d 1.366.000,00	1,200,000.00
022	> 902.000,00 s.d 1.034.000,00	968,000.00
023	> 744.000,00 s.d 902.000,00	823,000.00
024	> 656.000,00 s.d 744.000,00	700,000.00
025	> 534.000,00 s.d 656.000,00	595,000.00
026	> 476.000,00 s.d 534.000,00	505,000.00
027	> 382.000,00 s.d 476.000,00	429,000.00
028	> 348.000,00 s.d 382.000,00	365,000.00
029	> 272.000,00 s.d 348.000,00	310,000.00
030	> 256.000,00 s.d 272.000,00	264,000.00
031	> 194.000,00 s.d 256.000,00	225,000.00
032	> 188.000,00 s.d 194.000,00	191,000.00
033	> 136.000,00 s.d 188.000,00	162,000.00
034	> 128.000,00 s.d 136.000,00	132,000.00
035	> 104.000,00 s.d 128.000,00	116,000.00
036	> 92.000,00 s.d 104.000,00	98,000.00
037	> 74.000,00 s.d 92.000,00	83,000.00
038	> 68.000,00 s.d 74.000,00	71,000.00
039	> 52.000,00 s.d 68.000,00	60,000.00
040	≤ 52.000,00	50,000.00

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR

**Lampiran III : PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 4 TAHUN 2014
TANGGAL : 27 JANUARI 2014**

FORMAT KEPUTUSAN BUPATI



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR**

TENTANG

**PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
UNTUK KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat 2 Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor Tahun..... tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu melakukan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Penajam Paser Utara.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Untuk Kabupaten Penajam Paser Utara:
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 Nomor 1);
3. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor..... Tahun tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan sektor Perkotaan untuk wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini;
- KEDUA** : Daftar Biaya Komponen Bangunan sebagai dasar perhitungan nilai bangunan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penetapan Nilai Jual Objek Pajak bangunan untuk Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini;
- KETIGA** : Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan dasar pengenaan Pajak, sehingga penggunaan Nilai Jual Objek Pajak diluar kepentingan perpajakan bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku untuk Tahun Pajak

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal.....

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

.....

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
2. Dst..... (pihak terkait).

3 -

Lampiran II : **KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA**
NOMOR :
TANGGAL : _____

DAFTAR BIAYA KOMPONEN BANGUNAN TAHUN

PROVINSI : 31 - KALIMANTAN TIMUR

KECAMATAN : 001 - PENAJAM

KAB/KOTA : 71 - PENAJAM PASER UTARA

KELURAHAN : 003 - NENANG

NO	KOMPONEN JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN	LUAS/TYPE VOL/LBR BTG	LANTAI/TINGGI KOLOM	NILAI (Rp 1.000,00)
1	2	3	4	5
3	KOMPONEN MATERIAL 3.1. ATAP a. Dec/ Beton/ Genteng Glasur b. Genteng Beton / Alumunium c. Genteng Biasa / Sirap d. Asbes	- - - -	- - - -	193 173 114 63

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

.....

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR